



SALINAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/HUK/2026
TENTANG
KODE UNIT ORGANISASI PADA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pengamanan, temu balik, dan penilaian arsip di bidang persuratan, perlu ditetapkan kode unit organisasi pada naskah dinas;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 193/HUK/2022 tentang Kode Unit Organisasi pada Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan unit organisasi Kementerian Sosial sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Kode Unit Organisasi pada Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 59/HUK/2008 Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengurus Unit Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia Departemen Sosial RI;
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);

6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis, Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, serta Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1013);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 959);
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504);
12. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 509) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG KODE UNIT ORGANISASI PADA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Menetapkan kode unit organisasi pada naskah dinas di lingkungan Kementerian Sosial sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Kode unit organisasi pada naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan tanda atau simbol tertentu yang berupa angka sebagai tanda pengenal dan identifikasi terhadap satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.
- KETIGA : Kode unit organisasi pada naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari penomoran naskah dinas di lingkungan Kementerian Sosial.
- KEEMPAT : Manfaat pencantuman kode unit organisasi pada nomor naskah dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA yaitu:
- a. memudahkan dalam temu balik arsip;
 - b. memudahkan pelacakan arsip apabila kehilangan identitas pembuat naskah dinas; dan
 - c. memudahkan unit organisasi dalam pengelolaan naskah dinas.
- KELIMA : Seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial wajib menggunakan kode unit organisasi pada penomoran naskah dinas.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 193/HUK/2022 tentang Kode Unit Organisasi pada Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2026

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27/HUK/2026
TENTANG
KODE UNIT ORGANISASI PADA
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN SOSIAL

KODE UNIT ORGANISASI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE
A	Menteri Sosial		MS
B	Wakil Menteri		WMS
C	Sekretariat Jenderal		1
	1	Biro Perencanaan	1.1
	2	Biro Keuangan	1.2
	3	Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia	1.3
	4	Biro Hukum	1.4
	5	Biro Umum	1.5
	6	Biro Hubungan Masyarakat	1.6
	7	Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas	1.7
	8	Sekretariat KORPRI	1.8
D	Inspektorat Jenderal		2
	1	Sekretariat Inspektorat Jenderal	2.1
	2	Inspektorat Bidang Investigasi	2.2
	3	Inspektorat Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.3
	3	Inspektorat Bidang Rehabilitasi Sosial	2.4
	4	Inspektorat Bidang Pemberdayaan Sosial	2.5
	5	Inspektorat Bidang Penunjang	2.6
E	Direktorat Jenderal Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial		3
	1	Sekretariat Direktorat Jenderal	3.1
	2	Direktorat Jaminan Sosial	3.2
	2	Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan	3.3
	3	Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana	3.4
F	Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial		4
	1	Sekretariat Direktorat Jenderal	4.1
	2	Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak	4.2
	3	Direktorat Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas	4.3
	4	Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang	4.4
	5	Direktorat Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan Orang Dengan <i>Human Immunodeficiency Virus</i>	4.5
	6	Direktorat Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia	4.6
		Unit Pelaksana Teknis Bidang Rehabilitasi Sosial	
		1. Sentra Terpadu “Inten Suweno” di Bogor	4.7
		2. Sentra Terpadu “Pangudi Luhur” di Bekasi	4.8
		3. Sentra Terpadu “Prof. Dr. Soeharso” di Surakarta	4.9
		4. Sentra Terpadu “Kartini” di Temanggung	4.10
		5. Sentra “Handayani” di Jakarta	4.11
		6. Sentra “Mulya Jaya” di Jakarta	4.12
		7. Sentra “Efata” di Kupang	4.13

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE
		8. Sentra “Phalamartha” di Sukabumi	4.14
		9. Sentra “Wirajaya” di Makassar	4.15
		10. Sentra “Gau Mabaji” di Gowa	4.16
		11. Sentra “Antasena” di Magelang	4.17
		12. Sentra “Alyatama” di Jambi	4.18
		13. Sentra “Paramita” di Mataram	4.19
		14. Sentra “Abiseka” di Pekanbaru	4.20
		15. Sentra “Bahagia” di Medan	4.21
		16. Sentra “Wasana Bahagia” di Ternate	4.22
		17. Sentra “Galih Pakuan” di Bogor	4.23
		18. Sentra “Insyaf” di Medan	4.24
		19. Sentra “Satria” di Baturraden	4.25
		20. Sentra “Tumou Tou” di Manado	4.26
		21. Sentra “Wyata Guna” di Bandung	4.27
		22. Sentra “Mahatmiya” di Bali	4.28
		23. Sentra “Abiyoso” di Cimahi	4.29
		24. Sentra “Dharma Guna” di Bengkulu	4.30
		25. Sentra “Margo Laras” di Pati	4.31
		26. Sentra “Budi Luhur” di Banjarbaru	4.32
		27. Sentra “Budi Perkasa” di Palembang	4.33
		28. Sentra “Nipotowe” di Palu	4.34
		29. Sentra “Pangurangi” di Takalar	4.35
		30. Sentra “Meohai” di Kendari	4.36
		31. Sentra “Darussa’adah” di Aceh Besar	4.37
		32. Sentra Perintis “Bumi Segantang Lada” di Tanjung Pinang	4.38
G	Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial		5
	1	Sekretariat Direktorat Jenderal	5.1
	2	Direktorat Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil	5.2
	3	Direktorat Pemberdayaan Sosial Keluarga Miskin dan Rentan	5.3
	4	Direktorat Pemberdayaan Sosial Masyarakat	5.4
	5	Direktorat Pemberdayaan Potensi dan Sumber Daya Sosial	5.5
H	Staf Ahli Bidang Perubahan dan Dinamika Sosial		6
I	Staf Ahli Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial		7
J	Staf Ahli Bidang Aksesibilitas Sosial		8
K	Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Kesejahteraan Sosial		9
L	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial		10
	Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial		
	1	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Padang	9.1
	2	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Bandung	9.2
	3	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Yogyakarta	9.3
	4	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Banjarmasin	9.4
	5	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Makassar	9.5

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE
	6	Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial di Jayapura	9.6
	7	Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung	9.7
	8	Sekolah Rakyat Dasar	9.8
		1. Sekolah Rakyat Dasar 1 Jepara	9.8.1
		2. Sekolah Rakyat Dasar 2 Surakarta	9.8.2
		3. Sekolah Rakyat Dasar 3 Lombok Timur	9.8.3
		4. Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat	9.8.4
		5. Sekolah Rakyat Dasar 5 Sumbawa	9.8.5
		6. Sekolah Rakyat Dasar 6 Palangkaraya	9.8.6
		7. Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan	9.8.7
		8. Sekolah Rakyat Dasar 8 Ternate	9.8.8
	9	Sekolah Rakyat Menengah Pertama	9.9
		1. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 1 Deli Serdang	9.9.1
		2. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2 Medan	9.9.2
		3. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 3 Pekanbaru	9.9.3
		4. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 4 Padang	9.9.4
		5. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 5 Solok	9.9.5
		6. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 6 Jakarta Timur	9.9.6
		7. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 7 Sukabumi	9.9.7
		8. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 8 Cimahi	9.9.8
		9. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 9 Bandung	9.9.9
		10. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 10 Bogor	9.9.10
		11. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 11 Bandung Barat	9.9.11
		12. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 12 Pati	9.9.12
		13. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 13 Banyumas	9.9.13
		14. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 14 Batu	9.9.14
		15. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 15 Mojokerto	9.9.15
		16. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 16 Malang	9.9.16
		17. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 17 Tabanan	9.9.17
		18. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 18 Lombok Barat	9.9.18
		19. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 19 Kupang	9.9.19
		20. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 20 Banjarbaru	9.9.20
		21. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 21 Manado	9.9.21
		22. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 22 Sigi	9.9.22
		23. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 23 Makassar	9.9.23
		24. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 24 Gowa	9.9.24
		25. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari	9.9.25
		26. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate	9.9.26
		27. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 27 Banjarnegara	9.9.27
		28. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 28 Pasuruan	9.9.28
		29. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 29 Pamekasan	9.9.29
		30. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 30 Sidenreng Rappang	9.9.30
		31. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 31 Takalar	9.9.31
		32. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 32 Halmahera Utara	9.9.32
		33. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 33 Lhoksumawe	9.9.33

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	KODE
	34. Sekolah Rakyat Menengah Pertama 34 Majalengka	9.9.34
10	Sekolah Rakyat Menengah Atas	9.10
	1. Sekolah Rakyat Menengah Atas 1 Aceh Besar	9.10.1
	2. Sekolah Rakyat Menengah Atas 2 Aceh Besar	9.10.2
	3. Sekolah Rakyat Menengah Atas 3 Tebing Tinggi	9.10.3
	4. Sekolah Rakyat Menengah Atas 4 Padang	9.10.4
	5. Sekolah Rakyat Menengah Atas 5 Jambi	9.10.5
	6. Sekolah Rakyat Menengah Atas 6 Bengkulu	9.10.6
	7. Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang	9.10.7
	8. Sekolah Rakyat Menengah Atas 8 Ogan Ilir	9.10.8
	9. Sekolah Rakyat Menengah Atas 9 Jakarta Timur	9.10.9
	10. Sekolah Rakyat Menengah Atas 10 Jakarta Selatan	9.10.10
	11. Sekolah Rakyat Menengah Atas 11 Bandung	9.10.11
	12. Sekolah Rakyat Menengah Atas 12 Bogor	9.10.12
	13. Sekolah Rakyat Menengah Atas 13 Bekasi	9.10.13
	14. Sekolah Rakyat Menengah Atas 14 Bandung Barat	9.10.14
	15. Sekolah Rakyat Menengah Atas 15 Magelang	9.10.15
	16. Sekolah Rakyat Menengah Atas 16 Temanggung	9.10.16
	17. Sekolah Rakyat Menengah Atas 17 Surakarta	9.10.17
	18. Sekolah Rakyat Menengah Atas 18 Blora	9.10.18
	19. Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 Bantul	9.10.19
	20. Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 Sleman	9.10.20
	21. Sekolah Rakyat Menengah Atas 21 Surabaya	9.10.21
	22. Sekolah Rakyat Menengah Atas 22 Malang	9.10.22
	23. Sekolah Rakyat Menengah Atas 23 Pacitan	9.10.23
	24. Sekolah Rakyat Menengah Atas 24 Kediri	9.10.24
	25. Sekolah Rakyat Menengah Atas 25 Lamongan	9.10.25
	26. Sekolah Rakyat Menengah Atas 26 Makassar	9.10.26
	27. Sekolah Rakyat Menengah Atas 27 Takalar	9.10.27
	28. Sekolah Rakyat Menengah Atas 28 Tidore Kepulauan	9.10.28
	29. Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura	9.10.29
	30. Sekolah Rakyat Menengah Atas 30 Padang Sidempuan	9.10.30
	31. Sekolah Rakyat Menengah Atas 31 Pekanbaru	9.10.31
	32. Sekolah Rakyat Menengah Atas 32 Lampung Selatan	9.10.32
	33. Sekolah Rakyat Menengah Atas 33 Tangerang Selatan	9.10.33
	34. Sekolah Rakyat Menengah Atas 34 Lebak	9.10.34
	35. Sekolah Rakyat Menengah Atas 35 Wonosobo	9.10.35
	36. Sekolah Rakyat Menengah Atas 36 Bojonegoro	9.10.36
	37. Sekolah Rakyat Menengah Atas 37 Gresik	9.10.37
	38. Sekolah Rakyat Menengah Atas 38 Lombok Timur	9.10.38
	39. Sekolah Rakyat Menengah Atas 39 Makassar	9.10.39
	40. Sekolah Rakyat Menengah Atas 40 Ambon	9.10.40
	41. Sekolah Rakyat Menengah Atas 41 Biak Numfor	9.10.41
	42. Sekolah Rakyat Menengah Atas 42 Sarmi	9.10.42
	43. Sekolah Rakyat Menengah Atas 43 Magelang	9.10.43
	44. Sekolah Rakyat Menengah Atas 44 Minahasa	9.10.44
	45. Sekolah Rakyat Menengah Atas 45 Ogan Komering Ulu	9.10.45
	46. Sekolah Rakyat Menengah Atas 46 Pacitan	9.10.46

NO	NAMA UNIT ORGANISASI		KODE
	11	Sekolah Rakyat Terintegrasi	9.11
		1. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Cirebon	9.11.1
		2. Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Banyuwangi	9.11.2
		3. Sekolah Rakyat Terintegrasi 3 Pasuruan	9.11.3
		4. Sekolah Rakyat Terintegrasi 4 Sumedang	9.11.4
		5. Sekolah Rakyat Terintegrasi 5 Ponorogo	9.11.5
		6. Sekolah Rakyat Terintegrasi 6 Jember	9.11.6
		7. Sekolah Rakyat Terintegrasi 7 Probolinggo	9.11.7
		8. Sekolah Rakyat Terintegrasi 8 Jombang	9.11.8
		9. Sekolah Rakyat Terintegrasi 9 Banjarbaru	9.11.9
		10. Sekolah Rakyat Terintegrasi 10 Aceh Selatan	9.11.10
		11. Sekolah Rakyat Terintegrasi 11 Rokan Hilir	9.11.11
		12. Sekolah Rakyat Terintegrasi 12 Kepulauan Anambas	9.11.12
		13. Sekolah Rakyat Terintegrasi 13 Tanjung Jabung Timur	9.11.13
		14. Sekolah Rakyat Terintegrasi 14 Kaur	9.11.14
		15. Sekolah Rakyat Terintegrasi 15 Empat Lawang	9.11.15
		16. Sekolah Rakyat Terintegrasi 16 Bandung	9.11.16
		17. Sekolah Rakyat Terintegrasi 17 Cimahi	9.11.17
		18. Sekolah Rakyat Terintegrasi 18 Tuban	9.11.18
		19. Sekolah Rakyat Terintegrasi 19 Wajo	9.11.19
		20. Sekolah Rakyat Terintegrasi 20 Palu	9.11.20
		21. Sekolah Rakyat Terintegrasi 21 Mamuju	9.11.21
		22. Sekolah Rakyat Terintegrasi 22 Polewali Mandar	9.11.22
		23. Sekolah Rakyat Terintegrasi 23 Katingan	9.11.23
		24. Sekolah Rakyat Terintegrasi 24 Samarinda	9.11.24
		25. Sekolah Rakyat Terintegrasi 25 Bireuen	9.11.25
		26. Sekolah Rakyat Terintegrasi 26 Pidie Jaya	9.11.26
		27. Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Aceh Singkil	9.11.27
		28. Sekolah Rakyat Terintegrasi 28 Subulussalam	9.11.28
		29. Sekolah Rakyat Terintegrasi 29 Tapanuli Selatan	9.11.29
		30. Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan	9.11.30
		31. Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang	9.11.31
		32. Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna	9.11.32
		33. Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang	9.11.33
		34. Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur	9.11.34
		35. Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung	9.11.35
		36. Sekolah Rakyat Terintegrasi 36 Lebak	9.11.36
		37. Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang	9.11.37
		38. Sekolah Rakyat Terintegrasi 38 Kuningan	9.11.38
		39. Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Garut	9.11.39
		40. Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu	9.11.40
		41. Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Tasikmalaya	9.11.41
		42. Sekolah Rakyat Terintegrasi 42 Bandung	9.11.42
		43. Sekolah Rakyat Terintegrasi 43 Bekasi	9.11.43
		44. Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen	9.11.44
		45. Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang	9.11.45
		46. Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 Banyuwangi	9.11.46
		47. Sekolah Rakyat Terintegrasi 47 Malang	9.11.47
		48. Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Pasuruan	9.11.48
		49. Sekolah Rakyat Terintegrasi 49 Sumenep	9.11.49

NO	NAMA UNIT ORGANISASI	KODE
	50. Sekolah Rakyat Terintegrasi 50 Trenggalek	9.11.50
	51. Sekolah Rakyat Terintegrasi 51 Bangkalan	9.11.51
	52. Sekolah Rakyat Terintegrasi 52 Ketapang	9.11.52
	53. Sekolah Rakyat Terintegrasi 53 Pontianak	9.11.53
	54. Sekolah Rakyat Terintegrasi 54 Gunung Mas	9.11.54
	55. Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotawaringin Timur	9.11.55
	56. Sekolah Rakyat Terintegrasi 56 Banjarbaru	9.11.56
	57. Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 Samarinda	9.11.57
	58. Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda	9.11.58
	59. Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan	9.11.59
	60. Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Una-Una	9.11.60
	61. Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone	9.11.61
	62. Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 Tana Toraja	9.11.62
	63. Sekolah Rakyat Terintegrasi 63 Sinjai	9.11.63
	64. Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 Soppeng	9.11.64
	65. Sekolah Rakyat Terintegrasi 65 Barru	9.11.65
	66. Sekolah Rakyat Terintegrasi 66 Sidenreng Rappang	9.11.66
	67. Sekolah Rakyat Terintegrasi 67 Pangkajene Kepulauan	9.11.67
	68. Sekolah Rakyat Terintegrasi 68 Luwu Utara	9.11.68
	69. Sekolah Rakyat Terintegrasi 69 Buton Tengah	9.11.69
	70. Sekolah Rakyat Terintegrasi 70 Kendari	9.11.70
	71. Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Boalemo	9.11.71
	72. Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju	9.11.72
	73. Sekolah Rakyat Terintegrasi 73 Maluku Tengah	9.11.73
	74. Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual	9.11.74
	75. Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura	9.11.75
	76. Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika	9.11.76
	77. Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke	9.11.77
	78. Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen	9.11.78

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum

Rizi Umi Utami
197801282006042003